



SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA

Marisa Elsera¹, Heni Widiyani², Lia Nuraini³, Ayu Efrita Dewi⁴, Taufiqurrachman⁵, Susilawati⁶, Yuliana⁷, Patmawati⁸, Iswahyudi⁹, Firdaus¹⁰

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁶Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁷Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁸Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁹Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹⁰Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: marisaelsera@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 14-10-2021

Accepted: 18-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Adminstrasi
Kependudukan, Suku
Laut, Sosialisasi,
Pencatatan Sipil.

Keyword;

Population
Administration, Sea
Tribe, Socialization,
Civil Registration.

Abstrak:

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Merupakan hak bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, tak terkecuali masyarakat Suku Laut sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Namun karena keterbatasan akses dan pengetahuan membuat sebagian dari mereka belum mengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi yang hendak ditawarkan adalah menyelesaikan masalah minimnya pengurusan adminstrasi dengan system jemput bola. Tujuan kegiatan ini yakni memberikan pembimbingan adminstrasi kependudukan pada masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga, melalui sosialisasi dengan pembagian pamflet, diskusi dan pendampingan.

Abstract:

Population administration is a series of activities for structuring and controlling population data and documents through population registration, civil registration and population information management. Population Administration is a right for all communities, including the Sea Tribe as a Remote Indigenous Community (KAT). However, due to limited access and knowledge, some of them have not taken care of population administration. The socialization was carried out to solve the problem of the lack of administrative records with a pick-up system. The purpose of this activity is to provide population administration guidance to the Sea Tribe community in Lingga Regency, through socialization by distributing leaflets, discussions and mentoring.

PENDAHULUAN

Keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan realitas yang terkadang terabaikan di Indonesia, Mereka menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan, bukan hanya karena mendiami tempat-tempat terpencil secara geografis tapi juga keterpencilan yang disebabkan oleh struktur dan kultur. Kemudian, keterpencilan ini juga menyebabkan mereka tidak mampu menjadi bagian dari proses pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan.

Keterpencilan geografis berkonsekuensi pada terbatasnya akses bagi KAT untuk berbagai layanan sosial, ekonomi dan layanan dalam rangka memenuhi keperluan dasar mereka. Selain jaraknya yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi, mereka membutuhkan usaha lebih keras agar mampu memenuhi keperluan pangan, sandang serta keperluan harian lainnya. Masalah terbesar dari keterpencilan secara geografis ini adalah pada kemiskinan yang tentu saja akan berhimpitan dengan keterbatasan pemenuhan keperluan dasar lainnya.

Elsera (2019) menemukan bahwa masih ada Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Suku Laut) yang belum tersentuh dengan pelayanan administrasi, kendati sebagiannya sudah mendapatkan layanan administrasi. Kondisi ini kemudian berimbas pada porsi pembangunan daerah yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Suku Laut.

Seperti halnya di Desa Linau Batu, dalam penelitian Elsera (2019) ditemukan peran Tokoh Adat yang cukup besar dalam membantu pengurusan Kartu tanda Penduduk (KTP) ataupun urusan administrasi lainnya yang menyangkut data kependudukan. Pelayanan administrasi yang belum bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga berimbas pada pendataan dalam penerimaan bantuan sosial seperti PKH, raskin dan BLT. Mereka yang tidak memiliki KTP dan KK tentunya belum bisa mengakses bantuan tersebut.

Kondisi terkini masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga tidak bisa keluar dari kemiskinan. Keperluan dasar manusia meliputi pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber data alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik masih belum bisa terpenuhi. Guna mengentaskan kemiskinan pada masyarakat Suku Laut sebagai Komunitas Adat Terpencil, maka diperlukan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta dan perguruan tinggi untuk membantu komunitas terpencil mengentaskan kemiskinannya yakni dengan memandirikan KAT.

Indikator KAT yang mandiri yakni mendapatkan keadilan serta berperan aktif dalam pembangunan maka diperlukan suatu program atau kegiatan yang mengarah pada keperluan warga KAT. Permasalahan yang dihadapi oleh KAT menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk menangani masalah tersebut. Terkait dengan masalah KAT menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk membuat suatu kebijakan atau kegiatan yang mengarah pada penanganan masalah KAT. Dalam upaya mempercepat pembangunan bagi KAT, maka Kementerian Sosial mengarahkan program prioritas, program ini bertujuan untuk memberdayakan dan lebih meningkatkan kesejahteraan warga KAT.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi keperluan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan mewujudkan ; Perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan keperluan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, kemandirian sebagai warga Negara. Bentuk dari program pemberdayaan KAT ini harus sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan sosial yaitu terpenuhi kebutuhan dasar KAT.

Penelitian Marisa (2019) menjelaskan ada 4 peran aktor dalam pemberdayaan Masyarakat Suku Laut yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan keterpencilan bagi komunitas ini yang dijelaskan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Empat Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut

Aktor	Peran dalam Pemberdayaann	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan Policy, Implementasi Monitoring dan Evaluasi Mediasi	Kebijakan: Politik, umum, departemen/sektoral, penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hokum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, system manajemen informasi, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah action implementasi, donator, private investment pemeliharaan	Dana, alat, teknologi tenaga ahli dan sangat terampil.
Perguruan Tinggi	Kontribusi pada formulasi, dan monitoring.	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah action implementasi, donator, private investment pemeliharaan	Dana, alat, tenaga ahli terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek menghidupkan fungsi sosial kontrol.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Sumber: Elsera, Marisa (2019). SosioGlobalL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.3 No 2.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengabdian tersebut, maka dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 ini maka tim PKM yang terdiri dari lintas ilmu akan melakukan “Sosialisasi Adminisrasi Kependudukan Bagi Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga”. Adapun mitra yang akan membantu pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengurus Yayasan Kajang dan Masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga.

Kegiatan pengabdian ini sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan oleh ketua pelaksana pada semester ganjil 2020/2021 dalam SK Dekan FISIP Nomor 3234/UN53.5/HK.00/2020 yang dapat dilihat lebih rinci dalam tabel 1

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Ketua Pelaksana Kegiatan

No	Nama Mata Kuliah	Prodi
1.	Sosiologi Hukum	Sosiologi

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pembagian pamflet, diskusi dan pendampingan secara berkala. Lokasi pengabdian dilakukan di 6 titik, yakni: Kampung Baru, Desa Tanjungkelit, Desa Pena'ah, Desa Temiang, Pulau Senang dan Desa Air Ingat. Jumlah peserta yang hadir \pm 60 orang yang terdiri dari masyarakat Suku Laut. Adapun pembicara pada kegiatan ini adalah Marisa Elsera, S.Sos, M.Si dan Lenzy dengan moderator Emmy Solina, M.Si. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahap. **Tahapan pertama** dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2021 dimulai pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 15.30 WIB. Pada tanggal 29 Agustus Tim PKM bertolak dari Tanjungpinang ke Kabupaten Lingga menggunakan kapal laut pada jam 11.30 WIB. Jam 15.00 WIB sampai di Kediaman Dinas Bupati Lingga untuk FGD dengan pemerintah Kabupaten Lingga. Hari kedua, yakni 30 Agustus 2021 dilaksanakan penjajagan sekaligus membagikan leaflet tentang administrasi kependudukan, prosedur hingga tata cara pengurusan administrasi kepada masyarakat Suku Laut di 3 wilayah. Kemudian pada hari ketiga yakni 31 Agustus dilanjutkan kegiatan pembagian leaflet pada 3 wilayah pemukiman suku laut yang lainnya.

Tahapan kedua, yakni 13-15 September 2021 dilakukan diskusi dan pendampingan pada masyarakat Suku Laut dengan jemput bola ke pemukiman-pemukiman mereka bersama kepala desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga serta Dinas Sosial Kabupaten Lingga. Hari kedua dilaksanakan diskusi bersama masyarakat Suku Laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa sosialisasi administrasi kependudukan bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan perlindungan hak Suku Laut sebagai warga negara yakni dalam hal pemenuhan keperluan dasar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). Untuk itu, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Sosialisasi Administrasi Kependudukan bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga" dilaksanakan pada 6 wilayah/ pulau dimana Suku Laut bermukim, yakni Kampung Baru, Desa Tanjungkelit, Desa Pena'ah, Desa Temiang, Pulau Senang dan Desa Air Ingat. Sosialisasi dilakukan dengan cara jemput bola, yakni mendatangi pemukiman suku laut di 6 wilayah di Kabupaten Lingga. Berikut ini tahapan kegiatan PKM yang dilakukan tim:

a. Tahap Pertama, 29-31 Agustus 2021

Melakukan diskusi dan pendampingan pengurusan administrasi di wilayah Kabupaten Lingga. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah \pm 10 orang yang terdiri dari FGD bersama pemegang kepentingan seperti Bupati, Kepala OPD dari Dinas Sosial, Perkim, Disdukcapil dan Yayasan Kajang. Kemudian di hari kedua, dilakukan pembagian leaflet pada masyarakat Suku Laut di Desa Kampung Baru, Desa Tanjungkelit dan Desa Pena'ah. Hari ketiga, dilakukan kegiatan pembagian leaflet lanjutan untuk di Desa Temiang, Pulau Senang dan Desa Air Ingat. Berikut ini contoh leaflet yang dibagikan merupakan desain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga.



Gambar 4. Pembagian Leaflet Tentang Administrasi Kependudukan Kepada Suku Laut

b. Tahapan kedua, 13-15 September 2021

Melakukan diskusi dengan masyarakat Suku Laut tentang kebutuhan mereka akan pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) dan pencatatan sipil. Kendala-kendala yang dihadapi ketika mengurus adminduk. Temuannya, alasan geografis dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya administrasi kependudukan membuat sebagian masyarakat suku laut tidak melakukan pencatatan, terutama untuk pencatatan pernikahan, kematian dan kelahiran. Berikut ini bukti diskusi Marisa Elsera, S.Sos, M.Si dengan masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga.



Gambar 5. Penyampaian Materi Administrasi Kependudukan di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit



Gambar 5. Diskusi Administrasi Kependudukan dengan Masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit

Berdasarkan diskusi yang dilakukan Tim dengan masyarakat Suku Laut, disimpulkan beberapa poin penting pembahasan yang menjadi solusi dari kendala yang dihadapi masyarakat Suku Laut dalam hal Administrasi Kependudukan tersebut yaitu:

1. Melakukan jemput bola untuk pengurusan administrasi kependudukan secara berkala yang dibimbing oleh Tim dengan melibatkan keikutsertaan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga dan Aparatur Desa.
2. Menggunakan pendaftaran secara mobile phone untuk mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat Suku Laut yang membutuhkan layanan dengan CP dari Yayasan Kajang dan Tim PKM.

Tim PKM juga melibatkan Yayasan Kajang sebagai tim mitra yang mendampingi masyarakat Suku Laut untuk pengurusan administrasi kependudukan. Yayasan Kajang merupakan organisasi yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut yang bertempat di Kabupaten Lingga. Yayasan Kajang cocok untuk dijadikan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan ini mengingat intensitas mereka dengan masyarakat Suku Laut. Berikut ini kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Tim PKM, Yayasan Kajang kepada masyarakat Suku Laut.



Gambar 6. Pendampingan Pengurusan Administrasi Kependudukan



Gambar 7. Penyampaian Materi Oleh Lenzy dari Yayasan Kajang



Gambar 8. Pendampingan Pengurusan Adminstrasi Kependudukan Melibatkan Tim PKM, Yayasan Kajang dan Mahasiswa Magang Sosiologi.

SIMPULAN

Dari Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sosialisasi administrasi kependudukan yang dilakukan terhadap masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga. Secara geografis menyebabkan sulitnya akses menuju Desa yang umumnya berbeda pulau. Alasan lainnya, pengetahuan dari masyarakat Suku Laut yang masih minim terkait pentingnya pengurusan Adminstrasi Kependudukan. Solusi yang bisa ditawarkan Tim adalah melakukan penjemputan untuk pengurusan administrasi kependudukan secara berkala dengan membentuk kelompok kerja yakni OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Aparatur Desa, Yayasan Kajang dan Mahasiswa Sosiologi UMRAH.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada para peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Para Narasumber dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk pendanaan PKM sehingga mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Samad Ahmad.1985.Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jendera Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil Tahun I, II, dan III. 2009. *Penguatan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil*.
- Elsera, Marisa. 2019.*Identifikasi Permasalahan dan Upaya Pemberdayaan Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri*. Bandung: Jurnal SosioGlobal
- Elsera, Marisa 2019. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Laut: Praktik Sosial Suku Laut di Dusun Linau Batu Desa Tanjung Kelit Kabupaten Lingga. Tanjungpinang: UMRAH PRESS.
- Sri Wahyuni, Dampak Pembinaan Kesejahteraan Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan Suku Sakai Oleh Perusahaan Caltex di Duri, Skripsi tahun 2000
- Zen, Mohammad.2009. Orang Laut Studi Etnopedagogi. Jakarta: Yayasan Bahari Nusantara.